

Dampak Proses Politik dan Konsekuensi Ekonomi dalam Pembentukan Suatu Standar

Aida Ainul Mardiyah
E-mail : Aidaainulmardiyah@gmail.com
Stie Malangkucecwara Malang

ABSTRACT

Standard setters should consider the possibility of the political process and economic consequences in making standard. The underlying reason is to reduce the presence of the injured party. On this basis, it is necessary to public hiring, thereby reducing the injured parties. This paper aims to look at the impact of political and economic consequences in the establishment of standards by basing PAT theory, agency theory, signaling theory, and interest group theory of regulation (basing this theory that the legislature has the power to men-supply regulation). In addition, the economic consequences are phenomena that can explain the theory of capital markets are not efficient.

Keywords: *Economic Consequences, Political, Standards, Public Intersets Theory of Regulation, PAT.*

ABSTRAK

Penyusun standar seharusnya mempertimbangkan kemungkinan proses politik dan konsekuensi ekonomi dalam membuat standar. Alasan yang mendasari adalah untuk mengurangi adanya pihak yang dilukai. Atas dasar tersebut, maka perlu *public hiring* sehingga mengurangi adanya pihak yang dilukai. Makalah ini bertujuan melihat dampak proses politik dan konsekuensi ekonomi dalam pembentukan standar dengan mendasarkan teori PAT, teori keagenan, teori *signaling*, dan *interest group theory of regulation* (teori ini mendasarkan bahwa badan legislatif mempunyai kekuatan untuk men-*suplay* regulasi). Disamping itu, konsekuensi ekonomi adalah fenomena yang bisa menjelaskan adanya teori pasar modal tidak efisien.

Kata kunci: konsekuensi ekonomi, politik, standar, *public interset theory of regulation*, dan PAT

PENDAHULUAN

Standar dibentuk untuk mengurangi *moral hazard* yaitu manajemen berusaha untuk *overstated* (aktiva dan *revenues*) dan *understated* (*liability* dan *cost*) walaupun pada akhirnya juga muncul *moral hazard* yang lain yaitu proses politik. Pembentukan standar sebagai proses politik mempengaruhi pemerintah, sektor publik, dan sektor privat. Standar yang dibentuk digunakan sebagai *disclosure, uniformity, regulation, dan measurement*. Standar yang dibentuk selalu berkaitan dengan konsekuensi ekonomi yaitu berkaitan dengan kos keagenan (berapa banyak pihak yang dilukai) atau dengan kata lain berapa banyak kos yang dikeluarkan dengan adanya standar baru dan respon pasar —yang berkaitan dengan *publik goods* dan *economic goods*— . Laporan keuangan supaya *economic goods* (tidak ada kebocoran informasi), maka standar yang ditetapkan dan pembuatannya diserahkan kepada pasar.

TEORI DAN REVIEW PENELITIAN EMPIRIS

Positive Accounting Theory (PAT).

Pertanyaan ‘mengapa’ adalah ciri dari adanya konsekuensi ekonomi. Untuk menjelaskan fenomena tersebut diperkenalkan sebuah teori yang disebut dengan *positive accounting theory (PAT)*. Istilah positif menunjukkan bahwa sebuah teori dapat digunakan untuk memprediksi suatu kejadian di masa yang akan di dalam dunia nyata. Misalnya, untuk memprediksi mana yang akan digunakan oleh perusahaan minyak dan gas untuk biaya eksplorasinya (mengggunakan *successful-effort accounting (SE)* atau menggunakan *full-cost accounting (FC)*).

Sebuah perusahaan dapat dilihat sebagai suatu *nexus of contracts* sehingga perusahaan dapat digambarkan secara luas dengan sejumlah kontrak. Misalnya, kontrak dengan karyawan, manajer, suplier, dan penyedia modal. Kontrak-kontrak tersebut meliputi variabel-variabel akuntansi. Contohnya: *income* untuk mengukur kinerja, *financial ratios* seperti *debt to equity* atau *time interest earned* ataupun tingkat minimum modal kerja atau *equity*.

Perusahaan ingin meminimalkan *contracting cost*, seperti biaya negoisasi, biaya monitoring dari kinerja kontrak, kemungkinan negoisasi ulang, dan biaya kegagalan/kepailitan. PAT juga menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan akuntansi perusahaan akan dipilih dalam kaitannya dengan problem meminimalkan biaya kontrak. Misalnya Mian dan Smith (1990) melakukan studi mengenai pemilihan kebijakan akuntansi, untuk mengkonsolidasi anak perusahaan. Argumennya jika laporan keuangan konsolidasian dipersiapkan untuk *internal monitoring* (untuk melihat kinerja manajer) dan laporan keuangan konsolidasian untuk laporan kepada pihak eksternal maka biayanya menjadi lebih rendah.

Fleksibilitas manajemen dalam memilih kebijaksanaan akuntansi memberi peluang untuk perilaku oportunistik, dengan mengasumsikan manajer rasional

(seperti investor). Kasus minyak dan gas adalah contoh yang paling menarik dalam memilih *full effort* dibanding *successful-effort*.

Tiga Hipotesis Teori Akuntansi Positif.

Prediksi PAT dirumuskan oleh Watt dan Zimmerman (1986) dengan memberikan hipotesis oportunistik yaitu:

- a. Hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypotheses*). Rencana bonus memungkinkan untuk memilih prosedur akuntansi yang merubah *earnings* yang dilaporkan dari perioda masa yang akan datang ke perioda sekarang. Hipotesis ini masuk akal dimana manajer perusahaan seperti juga orang lain menginginkan gaji yang tinggi. Bila pemberian gaji tergantung bonus yang dihubungkan dengan *income* maka mereka dapat meningkatkan *income* yang dilaporkan untuk perioda sekarang.
- b. Hipotesis perjanjian utang (*the debt covenant hypothesis*). Seringkali manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan mengganti *incomes* yang dilaporkan dari perioda yang akan datang menjadi perioda sekarang. Alasannya peningkatan *income* yang dilaporkan akan mengurangi probabilitas dari kesalahan tehnis.
- c. Hipotesis biaya politik (*The political cost hypothesis*). Bila perusahaan menghadapi *political cost* yang lebih besar maka manajemen sebaiknya memilih prosedur akuntansi yang menunda *income* yang dilaporkan dari perioda sekarang menjadi perioda yang akan datang. Hipotesis *political cost* memperkenalkan sebuah dimensi politik ke dalam pemilihan kebijakan akuntansi.

Ketiga hipotesis merupakan komponen penting PAT. Seluruh komponen PAT yang punya daya prediksi diuji secara empiris (Boland dan Gordon (1992) serta Demski (1988)). Misalnya manajer perusahaan dengan rencana bonus diprediksi untuk memilih kebijakan akuntansi yang lebih konservatif dibanding manajer yang tidak memiliki perencanaan karena *income* yang dilaporkan lebih rendah. Demikian juga dengan *debt equity* ratio memilih kebijakan akuntansi yang kurang konservatif tetapi hipotesis *political cost* memilih kebijakan akuntansi yang lebih konservatif.

Hasil riset empiris PAT, misalnya: Menyelidiki reaksi terhadap *exposure draft* SFAS no. 19 sehingga mengubah metoda *successful effort* minyak dan gas menjadi *full cost*, hipotesis rencana bonus diteliti oleh Healy (1985), hipotesis perjanjian utang oleh Seewney (1994): dengan sampel 130 perusahaan manufaktur yang merupakan pelanggar perjanjian utang selama perioda 1980 dan 130 perusahaan industri yang sama yang tidak melanggar utang sebagai sampel kontrol. Hasilnya perjanjian pelanggaran utang untuk mempertahankan modal kerja dan *shareholder's equity* sedangkan *debt equity ratio* dan *interest coverage ratio* biasanya jarang dilanggar. Dari beberapa perusahaan sampel terlihat bahwa sifat dan biaya yang terjadi karena pelanggaran perjanjian utang meliputi peningkatan sekuritas, pembatasan pinjaman, dan tingkat suku bunga yang tinggi.

Jones (1991) mencoba meneliti berkaitan hipotesis *political*, dimana perusahaan melaporkan *income* lebih rendah pada saat investigasi untuk memudahkan impor dengan alasan kompetisi. Cara mendeteksi manipulasi kebijakan akuntansi dengan mendeteksi *discretionary accrual* untuk melihat kenaikan biaya depresiasi dan amortisasi, sehingga dapat mencatat kelebihan utang atas jaminan produk, kontijensi, dan potongan. Pengukuran dengan persamaan $TA_{jt} = \alpha_j + \beta_{1j} \Delta REV_{jt} + \beta_{2j} PPE_{jt} + \varepsilon_{jt}$

Membedakan PAT Opportunistik dan Efisien.

Seperti yang disebutkan diatas, tiga hipotesis PAT dinyatakan dalam bentuk oportunistik dengan asumsi manajer memilih kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan *expected utility*-nya. Hipotesis ini dapat juga dijelaskan dalam bentuk efisiensi dimana *internal control system* meliputi *monitoring* direktur, batasan *opportunistic*, dan meminimalkan *contracting cost*.

Dua bentuk PAT yaitu *opportunistic* dan efisiensi tersebut membuat prediksi sama. Sebagai contoh hipotesis rencana bonus, seorang manajer mungkin memilih metoda depresiasi garis lurus dibanding *declining balance* untuk menaikkan gaji. Ini adalah alasan efisiensi dengan anggapan depresiasi garis lurus adalah pengukur terbaik *opportunity cost* untuk penggunaan *fixed cost* perusahaan. Kemudian depresiasi garis lurus menghasilkan laporan *income* yang mengukur kinerja lebih efisien untuk memotivasi manajer dibanding menggunakan kebijakan depresiasi lainnya. Riset Sweeney (1994) jika perusahaan dalam keadaan bahaya dan lalai perjanjian utang dapat berganti metoda LIFO untuk meningkatkan profit yang dibebankan kepada kreditur. Alasannya dengan pengurangan persediaan dapat menjadi strategi bisnis untuk meningkatkan *cash flow* khususnya jika perusahaan menderita kerugian pajak. Riset-riset sekarang mencoba menjelaskan apakah pemilihan kebijakan akuntansi didorong oleh oportunistik atau efisiensi dilakukan oleh Christie dan Zimmerman (1994), Dechow (1994), serta Sweeney (1994).

Agency Theory

Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai lokus (titik temu) hubungan keagenan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*). Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan dalam perusahaan berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka (Wolk dan Tearney, 1996: 89). Usaha maksimalisasi utilitas ini mendorong timbulnya konflik kepentingan di antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*), karena setiap pihak berusaha memaksimalkan kepentingannya: pemilik menginginkan tercapainya tingkat profitabilitas yang selalu meningkat, sedangkan manajemen berusaha memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya melalui kontrak kompensasi.

Untuk mengatasi konflik tersebut, pemilik menempatkan fungsi pemantauan (*monitoring*). Bentuk pemantauan yang umum digunakan di

antaranya adalah (1) penyusunan laporan keuangan periodik untuk kepentingan pemilik (*stewardships* dan *accountability*) dan (2) adalah fungsi *auditing* yang bersifat independen dalam menyatakan pendapat mereka atas kewajaran laporan keuangan perusahaan (Francis dan Wilson (1988) dalam Zuhror (1996)). Laporan keuangan yang disusun manajer diharapkan dapat menyajikan tingkat *income* yang wajar yang biasanya menunjukkan tingkat variabilitas *income* yang relatif tidak signifikan dalam beberapa periode laporan keuangan. Dengan kata lain, manajer akan selalu berusaha mencapai tingkat *income* yang diinginkan pemilik, menyajikan tingkat *income* yang wajar, dan menjaga variabilitas *income*.

Dalam hubungan keagenan, manajer memiliki asimetri informasi dan dapat menggunakan informasi yang diketahuinya secara lebih fleksibel dalam usaha memaksimalkan kepentingannya. Salah satu contohnya *income smoothing*. Penelitian berkaitan dengan *income smoothing* akan dibahas lebih detail di bab contoh-contoh literatur yang membahas konsekuensi ekonomi.

Signaling Theory

Dorongan faktor ekonomi untuk melaporkan sesuatu hal (bahkan sesuatu hal yang buruk) merupakan inti argumentasi *signalling theory*. (Wolk dan Tearney, 1996: 91). Dalam kasus perilaku *income smoothing*, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang mengandung *income smoothing* sebenarnya didorong oleh faktor ekonomi. Disamping itu, secara logis, dari sudut pandangan pemakai laporan keuangan, perilaku *income smoothing* itu sendiri merupakan praktik akuntansi yang tidak jujur dan tidak sehat dan perilaku *income smoothing* yang terungkap akan dipandang sebagai informasi *income* yang "buruk" karena dapat menyesatkan pengambilan keputusan investasi saham yang dilakukan oleh praktisi pasar saham. Hal ini sejalan dengan pendapat Gordon (1964) yang menjelaskan bahwa *income smoothing* dapat memberikan sinyal bias kepada pemegang saham dalam pengambilan keputusan untuk memperkirakan kemungkinan *income* yang akan datang yang didasarkan pada *income* yang lalu.

Signalling theory menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut karena manajer mengetahui lebih banyak informasi mengenai perusahaan dan prospeknya di masa yang akan datang dibandingkan pihak eksternal perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki informasi *income* yang bersifat netral (apa adanya atau sesuai dengan kondisi riil yang ada) akan termotivasi untuk melaporkan informasi tersebut dengan tujuan untuk menghindari kecurigaan pihak eksternal bahwa perusahaannya memiliki informasi yang buruk. Manajer perusahaan yang memiliki informasi *income* yang relatif rendah punya kecenderungan untuk menerbitkan laporan keuangan (perilaku *income smoothing*) dengan tujuan menjaga kredibilitas perusahaan tersebut di pasar saham (Wolk dan Tearney, 1996:91). Apakah usaha manajer dalam melakukan *income smoothing* berhasil mempengaruhi keputusan investasi para praktisi pasar saham? Hasil penelitian Lev dan Kunitzky (1974) menunjukkan bahwa pemegang saham bukanlah

kelompok pengguna laporan keuangan yang naif artinya pemegang saham tidak mudah dibodohi dengan adanya tindakan manajemen tersebut.

Public Interest of Theory

Ada dua teori dalam kaitannya dengan regulasi. Pertama, *public interest theory* menggambarkan bahwa regulasi harus memaksimalkan kesejahteraan sosial; kedua, *interest group theory of regulation* menyarankan bahwa bentuk koalisi individu untuk memproteksi dan mempromosikan dengan melobi pemerintah (Scott, 1997: 356).

Interest group theory of regulation merupakan dasar untuk menganalisa makalah ini dimana badan legislatif memenuhi kriteria sebagai kekuatan untuk men-suplay regulasi. Perhatian dari otoritas politik diutamakan untuk mempertahankan kekuatan, akibatnya perlu mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak (adanya kompromi-kompromi).

Proses penyusunan standar berguna tetapi juga harus diterima oleh konstituensi lain, khususnya manajemen (ini menempatkan penyusunan standar pada suatu konflik). Berkaitan dengan konsekuensi ekonomi, kos suatu standar adalah kos yang dibebankan pada perusahaan dan manajer untuk memenuhi standar tersebut (tetapi di luar *out-of-pocket cost* dalam menghasilkan informasi baru). Kos juga dibuat dengan konstruk rigit seperti penambahan probabilitas *violating debt covenant* dan aliran *volatility* bonus manajer di masa yang akan datang. Kos ini dapat mempengaruhi operasional dan kebijaksanaan finansial, sehingga dengan kenyataan bahwa standar yang baru perlu terlepas dari informasi sebelumnya. Ini berkaitan dengan profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang bisa menguntungkan dan merugikan dipengaruhi oleh pengurangan *competitive advantage*.

Pada dasarnya masyarakat luas mengukur keberhasilan perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan yang terlihat dari kinerja manajemen. Di sini terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Manajemen berkepentingan untuk mendapatkan imbalan guna peningkatan kesejahteraan, sedangkan pemegang saham berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya guna meningkatkan kekayaannya. Jika manajemen dapat menunjukkan prestasi yang baik, maka manajemen akan memperoleh penghargaan dan imbalan yang besar.

Guna kelancaran usahanya suatu perusahaan membutuhkan sumber dana baik dari kreditor maupun investor. Ada suatu rasionalitas bahwa kreditor maupun investor akan memberikan dana sesuai dengan kemampuan atau kondisi perusahaan. Semakin baik kemampuan perusahaan, maka akan semakin besar dana yang dapat diperoleh. Hal inilah yang membentuk suatu pengharapan dari manajemen perusahaan.

Pendapat Watts dan Zimmerman (1989), Hargerman dan Zmijewski (1979), serta Benston dan Krasney (1978) yang dikutip dari Moses (1978) menyatakan bahwa perusahaan merupakan subyek amatan masyarakat dan pemerintah. Fluktuasi *income* yang besar dapat menarik perhatian pembuat peraturan

menurut Benston dan Krasney (1978) dalam Moses (1987). Fluktuasi kenaikan *income* yang besar dapat diterima sebagai suatu sinyal praktek monopolistik sehingga pembuat peraturan bertindak (Ronen dan Sadan, 1975).

DAMPAK POLITIK DAN KONSEKUENSI EKONOMI DALAM PEMBENTUKAN SUATU STANDAR

Dampak Politik

Pada mulanya akuntansi dipandang sebagai subjek non politik. Keterlibatan politik lebih banyak di bidang matematik atau astronomi, psikologi, survai, teknologi komputer, atau statistik (Solomons, 1978). Perkembangan selanjutnya, pada saat penetapan standar akuntansi dianggap mempengaruhi perilaku ekonomi. Dengan demikian akuntansi dapat mempengaruhi perilaku manusia dan proses yang disebut dengan proses politik (Solomons, 1978).

Beberapa artikel yang mengungkapkan bahwa politik dalam akuntansi menjadi signifikan, misalnya: Gerboth (1973), Horngren (1973), serta May dan Sundem (1976). Gerboth (1973) menyatakan “bila proses pengambilan keputusan tergantung kepada kesuksesan untuk meyakinkan publik, isu tersebut tidak bersifat tehnikal lagi; tetapi bersifat politikal.” Artinya bila terjadi konflik antara kepentingan yang berbeda perlu adanya kompromi. Kompromi ini merupakan esensi politik.

Horngren (1973) menyatakan bahwa penetapan standar akuntansi merupakan produk politik baik secara logika maupun secara empiris. Pendapat May dan Sundem (1976) adalah dalam praktek maupun teori, pengaruh kuat laporan akuntansi pada kesejahteraan sosial perlu dicatat. Sehingga bukan merupakan kejutan bila FASB adalah badan politik, sebab proses seleksi alternatif akuntansi merupakan proses politik” atau dengan kata lain FASB harus mempertimbangkan aspek politik secara eksplisit (misal kesejahteraan sosial) seperti keputusan teori akuntansi dan riset akuntansi.

Financial Accounting Foundation menyatakan “Proses penetapan standar akuntansi dapat digambarkan sebagai suatu demokrasi karena semua peraturan yang dibuat tergantung pada perizinan pembuat peraturan. Tetapi karena penetapan standar berkaitan dengan kepentingan sosial maka semua pendapat harus didengar (penyusunan standar bersifat menyeluruh dan tidak hanya yang bersifat *specifict group*). Proses penyusunan standar sebagai proses politik karena ada upaya mendidik dalam memperoleh standar baru. Disamping itu dalam penyusunan standar ada tanggungjawab FASB kepada setiap orang.

Ada aspek politik dalam akuntansi seperti halnya ada aspek politik secara fisik. Hasil penelitian fisik seperti geologi menghabiskan biaya yang sangat besar pada riset energi nuklir dan senjata. Sehingga perlu hati-hati apakah politik berperan atau tidak dalam penetapan standar akuntansi. Implikasinya

FASB dimasa depan perlu memperhatikan isu ini karena berkaitan dengan kredibilitas akuntansi itu sendiri.

Pertimbangan politik bisa mempengaruhi formulasi standar akuntansi dan mempengaruhi keputusan ekonomi individu dan akhirnya mempengaruhi tujuan ekonomi secara makro. Contohnya, pada saat perencanaan ekonomi perlu standar akuntansi, sehingga sejak tahun 1973 muncul kesadaran perlunya akuntan untuk bekerja sama dengan pemerintah. Dampaknya standar laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan bermanfaat dalam keputusan ekonomi. Atau dengan kata lain standar laporan perusahaan konsisten dengan tujuan ekonomi makro karena FASB mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi perilaku ekonomi dan mendorong rencana ekonomi pemerintah.

Dampak Konsekuensi Ekonomi

Ada hubungan antara teori pasar efisien dengan konsekuensi ekonomi. Pernyataan ini untuk menjelaskan adanya anomali dari teori pasar efisien yaitu pernyataan bahwa pasar tidak akan bereaksi harga sahamnya selama informasi yang tersaji tidak mempengaruhi arus kas. Jika tidak ada reaksi harga saham berarti pasar anomali tetapi bukan berarti pasar tidak efisien. Fenomena yang bisa menjelaskan atas anomali pasar adalah konsekuensi ekonomi (Scott,1997:189).

Konsep konsekuensi ekonomi berkaitan dengan:1) masalah kepemilikan, 2) kebijaksanaan akuntansi tidak bertentangan dengan pengalaman akuntan, dan 3) konsekuensi ekonomi menimbulkan pertanyaan 'mengapa' berbeda.

Salah satu pertimbangan paling persuasif atas eksistensi konsekuensi ekonomi nampak dalam artikel Stephen Zeff (1978) yang berjudul "*The Rise of 'Economic Consequences.'*" Esensi dari definisi ini adalah bahwa laporan akuntansi dapat mempengaruhi keputusan riil yang dibuat oleh para manajer. Kebebasan manajer berkurang dalam memilih kebijakan akuntansi yang berbeda sebagai sumber konsekuensi ekonomi. Penyusun standar seharusnya mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi ekonomi dari standar yang baru sebagai sumber kos yang penting. Konsekuensi ekonomi mengarahkan secara langsung pada kriteria aspek politik dalam pembentukan suatu standar (Scott, 1997: 189).

Munculnya Konsekuensi Ekonomi

Sejak tahun 1960-an, profesi akuntan Amerika telah menyadari adanya pengaruh "kekuatan luar" yang terus meningkat dalam proses pembentukan standar. Kekuatan luar adalah: 1) individu dan kelompok telah campur tangan dalam proses pembentukan standar-standar akuntansi, dan 2) pihak-pihak ini mulai memunculkan argumen konsekuensi ekonomi.

Konsekuensi ekonomi dapat bersifat mengganggu terhadap kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu oleh karena itu badan pembuat standar perlu mempertimbangkan konsekuensi ekonomi dalam pembentukan suatu standar.

Debat mengenai translasi mata uang asing dan eksplorasi industri perminyakan adalah contoh mengenai konsekuensi ekonomi yang cukup baik.

Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa konsekuensi ekonomi menjadi isu substantif sejak tahun 1970-an. Pertama, manajemen dan pihak-pihak tertentu secara pradominan menggunakan argumennya sehingga dapat mempengaruhi badan-badan pembentuk standar dan kedua, adanya kontroversi CAP dan APB dalam pembentukan standar.

Konsekuensi Ekonomi Sebagai Suatu Isu Substantif

Konsekuensi ekonomi menjadi isu substantif dengan beberapa alasan (Zeff, 1978):

- a. Dekade tahun 1970-an masyarakat Amerika mulai sadar adanya dampak pembentukan standar berkaitan dengan konsekuensi sosial, lingkungan, dan ekonomi.
- b. Sejak pertengahan tahun 1960-an, APB dan FASB telah mempertimbangkan perubahan perilaku pembuatan keputusan agar dapat mengakomodasikan standar-standar akuntansi yang baru dimunculkan.
- c. Beberapa isu yang dihadapi APB dan FASB mempunyai dampak besar perlu ditinjau lagi, misalnya: minyak dan gas.
- d. Perkembangan sosial dan ekonomi yang berdampak pada *usefulness* keputusan akuntansi.
- e. Atas standar yang sudah dibuat sebelum digunakan perlu adanya *public hearing* agar standar yang sudah ada mendapat masukan dari pihak-pihak luar agar dapat di-kritisasi.
- f. Penelitian-penelitian yang berkaitan konsekuensi ekonomi sebagai masukan bagi badan-badan pembentukan standar.
- g. Transaksi pasar modal meningkat dimana konsekuensi ekonomi sebagai penjelasan tidak efisiennya EMH.
- h. Figur akuntansi dipandang sebagai suatu instrumen kontrol sosial.
- i. Sebelum tahun 1960-an, kontroversi akuntansi jarang dilaporkan di dalam pers keuangan dengan anggapan bahwa akuntansi merupakan suatu parameter konstan. Dengan publisitas akuntansi untuk kredit investasi pada tahun 1962-1963 (dialog AICPA tahun 1963-1964 dengan APB) akhirnya para manajer dan pihak luar telah menyadari bahwa akuntansi bisa menjadi variabel yang signifikan.
- j. Penggunaan argumen ketiga yang terus berkembang dan debat akuntansi.
- k. Konsekuensi ekonomi telah menjadi isu penting ketika akuntansi dan akademi keuangan membantu mengembangkan pasar modal U. S. menjadi pasar modal efisien. Mendasarkan konsekuensi ekonomi, maka informasi yang tersedia secara publik dan pasar tidak bisa “dibodohi” dengan penggunaan metode akuntansi yang berbeda untuk merefleksikan realita

ekonomi atau dengan kata lain konsekuensi menjadi isu penting untuk menjelaskan ketidakefisienan pasar modal.

Dampak Politik dan Konsekuensi Ekonomi Dalam Pembentukan Suatu Standar

Standar dibentuk untuk mengurangi *moral hazard* yaitu manajemen berusaha untuk *overstated* (aktiva dan *revenues*) dan *understated* (*liability* dan *cost*) walaupun pada akhirnya juga muncul *moral hazard* yang lain yaitu proses politik. Pembentukan standar sebagai proses politik mempengaruhi pemerintah, sektor publik, dan sektor privat. Standar yang dibentuk digunakan sebagai *disclosure* (contoh: *contigent liabilities* bila jumlah bisa diperkirakan harus di-*recognition*/dijurnal), *uniformity* (*uniformity* artinya standar akuntansi dibuat dalam upaya terjadinya keseragaman dengan asumsi: intepretasi tunggal dan mempunyai daya komparabilitas yang tinggi), *regulation* (contoh: *gain* dan *losses* tidak boleh dari operasi dan penempatannya sesudah pajak), dan *measurement* (investasi jangka panjang dengan NPV). Standar yang dibentuk selalu berkaitan dengan konsekuensi ekonomi yaitu berkaitan dengan kos keagenan (berapa banyak pihak yang dilukai atau dengan kata lain berapa banyak kos yang dikeluarkan dengan adanya standar baru dan respon pasar (yang berkaitan dengan *publik goods* (tidak ada nilainya yang sering ditumpangi *free raider*) dan *economic goods* (barang ekonomis/bernilai sehingga perlu usaha untuk mendapatkannya supaya *economic goods* maka L/K tidak ada kebocoran informasi sehingga standar harus ditetapkan dan pembuatannya diserahkan kepada pasar). Lebih jelas dapat dilihat dalam gambar 1.

Pentingnya Kenetralan

Pandangan Hawkins (1975) bahwa FASB mempunyai *power* untuk mempengaruhi perilaku ekonomi dan mendukung perencanaan ekonomi pemerintah. Atas keyakinan tersebut Hawkins (1975) yakin *power* tersebut dapat merusak akuntansi. Pemerintah mempunyai kebiasaan merubah rencana mereka dari tahun ke tahun, bahkan dari bulan ke bulan. Apakah standar akuntansi akan dirubah seiring dengan perubahan kondisi politik?

Kenetralan (*neutrality*) dalam akuntansi sangat diperlukan dan harus mendapat perhatian sehingga pemakai informasi keuangan menjadi lebih *reliable*, *verifiability*, *objectivity*, *lack of bias*, *neutrality*, dan *accuracy*. Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah FASB adalah badan yang netral dan menyangkal adanya kontrol oleh kelompok-kelompok kepentingan khusus dilakukan oleh Haring (1979), Hussein dan Ketz (1980), Newman (1981a, 1981b), dan Selto dan Grove (1982), walaupun sebenarnya seperti dalam Miller dan Redding (1988) bahwa FASB adalah badan politik.

Akuntansi Sebagai Perpetaan Keuangan

Akuntansi adalah pemeta keuangan. Peta yang baik adalah peta yang lebih lengkap dan menggambarkan fenomena yang sedang dipetakan. Peta tidak

terpengaruh oleh perilaku, curah hujan, distribusi kesejahteraan, meningkatnya populasi, dan lain-lain Akuntansi sebagai pemeta keuangan seharusnya tidak terpengaruh oleh kondisi politik atau beradaptasi dengan politik (dengan kata lain akuntansi harus netral).

Beberapa Pandangan Yang Bertentangan

Perbedaan muncul karena sudut pandang yang berbeda, misalnya: pengaruh ekonomi, sifat fundamental, dan kenetralan. Penyusun standar tidak akan pernah melepas secara total pengaruh dampak ekonomi. Yang lain mengatakan bahwa kenetralan dalam standar akuntansi jika pemilihan metode pelaporan tidak *independent* (bebas) artinya pengukuran-pengukuran yang dipilih dengan tujuan-tujuan politik tertentu. Sebagai contoh, pemerintah (perpajakan) untuk menentukan pendapatan kena pajak dengan cara apapun. Hal tersebut akan menjadikan masalah bagi para akuntan yang menggunakan metoda yang berbeda. Kosekuensi ekonomi ini dapat menjelaskan mengapa perusahaan-perusahaan tidak semuanya memilih metode-metode akuntansi yang sama. Mereka tidak semuanya menggunakan model-model prediksi yang sama, dan oleh karenanya metode akuntansi bukan merupakan metode dengan sifat yang sama bagi perusahaan lain. Salah satu moral yang mungkin dapat diambil dari pernyataan ini yaitu masih berlaku '*laissez faire*'. (Beaver dan Dukes (1972), Gonedes dan Dopuch (1974), serta Whittred dan Taylor (1996).

CONTOH-CONTOH LITERATUR YANG MEMBAHAS KONSEKUENSI EKONOMI

Beberapa kontraversi di dalam akuntansi ada dalam Miller dan Redding (1988: 83-107), misalnya: 1) kapitalisasi vs *expensing*; riset dan perkembangan kos, *interest cost*, perkembangan *software cost*, dan *oil and gas accounting*; 2) *Off-balance Sheet financing: leases*, pensiun, *unconsolidated finance Subsidiaries*; 3) *Income taxes: deffered taxes*; 4) *The investment tax Credit*; 5) *Changes prices: price-level adjustment*; serta 6) *current value*. Aplikasi di Indonesia yang membahas mengenai akuntansi minyak dan gas, akuntansi kerugian mata uang asing, akuntansi *lease*, serta akuntansi pensiun akan dibahas dalam artikel berikutnya. Dalam artikel ini tidak akan dibahas secara detail dan penulis hanya membatasi contoh-contoh literatur secara empiris yang membahas konsekuensi ekonomi yaitu: *income smoothing* dan *goodwill* di Australia.

Konsekuensi Ekonomi Praktek *Income smoothing*

Berdasarkan pada pengaruh manipulasi terhadap *income*, Ilmainir (1993) menyatakan bahwa usaha manajemen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu usaha untuk memaksimalkan atau meminimumkan *income* dan usaha untuk mengurangi fluktuasi *income* (*income smoothing*). Secara eksplisit, usaha untuk

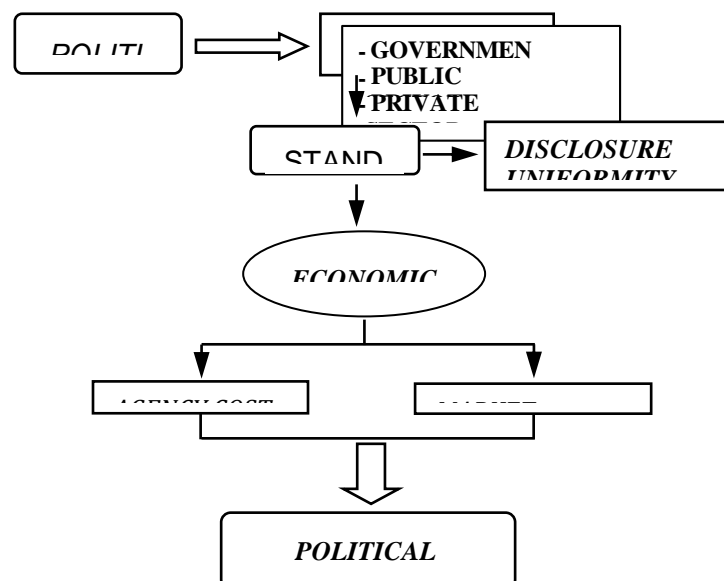
memaksimumkan atau meminimumkan *income* merupakan hipotesis penelitian tentang konsekuensi ekonomi dari pilihan akuntansi. Sedangkan usaha untuk mengurangi fluktuasi *income* adalah suatu bentuk manipulasi *income* agar jumlah *income* suatu periode tidak terlalu berbeda dengan jumlah *income* periode sebelumnya.

Income smoothing menyebabkan pengungkapan *income* menjadi tidak akurat, dan ini akan menyebabkan investor tidak dapat memperoleh informasi yang cukup untuk mengevaluasi tingkat pengembalian saham dan risiko saham yang timbul atas portofolio yang dimiliki investor menurut Albrecht dan Richardson (1990) serta Ashari *et al.* (1994). Laporan keuangan merupakan media informasi yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui keadaan perusahaan. Adanya tindakan *smoothing* akan menimbulkan kesalahan penilaian terhadap keadaan suatu perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama investor. Keadaan ini harus segera dipublikasikan untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan.

Tindakan *smoothing* ternyata bukan saja dilakukan terhadap *income* tetapi juga dilakukan terhadap informasi keuangan lainnya termasuk rasio keuangan, yang berarti ada kemungkinan terjadinya *smoothing* pada pos-pos neraca. Beberapa penelitian di luar negeri sudah membuktikan adanya tindakan *smoothing* terhadap rasio keuangan.

Penelitian yang tidak menyetujui adanya praktik *income smoothing* antara lain dilakukan oleh Hector (1989) yang menyatakan bahwa *income smoothing* sebagai penyalahgunaan dalam pelaporan keuangan sehingga seharusnya diwaspadai oleh pemakaiannya dan McHugh (1992) yang menyatakan bahwa *income smoothing* merupakan manipulasi atas laporan keuangan.

Gambar 1: Lingkungan Standar (Sumber: Diringkas dari berbagai penelitian)



Alasan untuk *Income Smoothing*

Konsep mengenai *income smoothing* diperkenalkan oleh Hepworth (1953). Hepworth (1953) mengungkapkan bahwa manajer yang termotivasi untuk melakukan *income smoothing* pada dasarnya ingin mendapat berbagai keuntungan ekonomi dan psikologis, yaitu: 1) mengurangi total pajak; 2) meningkatkan kepercayaan diri manajer yang bersangkutan karena *income* yang stabil mendukung kebijakan deviden yang stabil pula; 3). meningkatkan hubungan antara manajer dan karyawan karena pelaporan *income* yang meningkat tajam memberi kemungkinan munculnya tuntutan kenaikan gaji dan upah; 4). aliran *income* berdampak psikologis, misalnya kenaikan atau penurunan berdampak pada rasa pesimis atau optimis dapat diperlunak.

Foster (1986: 224) mengemukakan bahwa *income smoothing* dilakukan untuk: 1) memperbaiki citra perusahaan di mata pihak luar bahwa perusahaan tersebut memiliki risiko yang rendah; 2) memberikan informasi yang relevan dalam melakukan prediksi terhadap *income* di masa mendatang; 3) meningkatkan kepuasan-kepuasan relasi-relasi bisnis; 4) meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemampuan manajemen; dan 5) meningkatkan kompensasi bagi pihak manajemen.

Penelitian lain yang berkaitan dengan *income smoothing* dilakukan oleh Gordon (1964), Copeland dan Licastro (1968), Beidleman (1973), Lev dan Kunitzky (1974), Ronen dan Sadan (1975), serta Trueman dan Titman (1988). Gordon (1964) menyatakan bahwa *income smoothing* dapat mengurangi kesalahan pemegang saham dalam mengekstrapolasi *income* periode lalu untuk memperkirakan *income* di masa datang. *Income smoothing* yang terjadi di pasar saham berpengaruh terhadap para pemegang saham. Gordon (1964) juga menjelaskan bahwa kepuasan para pemegang saham meningkat dengan adanya *income* perusahaan yang stabil. Beidleman (1973) berpendapat bahwa *income smoothing* seharusnya memperluas pasar saham perusahaan dan membawa pengaruh yang menguntungkan nilai saham perusahaan.

Penelitian Copeland dan Licastro (1968) mendasarkan hipotesis Gordon (1964). Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah pendapatan dividen dari anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi dengan metode biaya (*cost method*). Analisa data dengan uji *Chi-square*. Hasil penelitian ini tidak signifikan artinya tidak ada hubungan antara dividen dengan praktik *income smoothing*.

Hasil penelitian Beidleman (1973) menunjukkan bahwa kompensasi insentif, biaya pensiun, biaya riset dan pengembangan, penjualan, serta biaya iklan merupakan variabel *income smoothing*. Penelitian Smith (1976) serta Kamin dan Ronen (1978) menunjukkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh manajer memiliki kecenderungan untuk melakukan *income smoothing* dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemilik.

Sebaliknya, penelitian Lev dan Kunitzky (1974) tidak mendukung Gordon (1964) menyatakan bahwa kondisi tersebut tidak dapat dengan sendirinya membuktikan bahwa para pemegang saham lebih menyukai *income smoothing*. Analisis

beberapa literatur tersebut merupakan gambaran *signalling theory* dalam praktik di pasar saham. Pendapat Lev dan Kunitzky (1974) tersebut secara jelas menunjukkan implikasi sekaligus premis bahwa *signalling theory* berpengaruh terhadap perilaku *income smoothing* oleh suatu perusahaan di pasar saham yang ditunjukkan oleh reaksi pergerakan harga saham perusahaan tersebut.

Ronen dan Sadan (1975) juga menyatakan bahwa *income smoothing* konsisten dengan keinginan manajemen untuk memaksimalkan kompensasi. Ronen dan Sadan (1975) menunjukkan bahwa *income smoothing* yang melalui periode waktu tertentu dapat dilakukan melalui tiga cara. Pertama, manajemen dapat menentukan waktu terjadinya kejadian tertentu melalui kebijaksanaan yang dimiliki (misal: biaya riset dan pengembangan) untuk mengurangi variasi *income* yang dilaporkan. Sebagai alternatif, manajemen juga dapat menentukan waktu pengakuan kejadian tersebut. Jadi *income smoothing* dapat dilakukan dengan mengendalikan saat terjadinya atau saat pengakuan suatu kejadian. Kedua, manajemen dapat mengalokasikan pendapatan atau biaya tertentu untuk beberapa periode akuntansi. Sebagai contoh di dalam penentuan metode depresiasi dimana manajemen dapat memilih antara metode garis lurus dan metode penyusutan yang dipercepat. Ketiga, manajemen memiliki kebijaksanaan sendiri di dalam mengklasifikasikan pos-pos laba rugi tertentu ke dalam kategori yang berbeda. Ronen dan Sadan (1975) menguji dua macam *smoothing*. Dari hasil penelitian tersebut juga ditemukan bahwa perusahaan melakukan *income smoothing* dengan mengklasifikasikan pos-pos yang dapat dimasukkan sebagai pos-pos luar biasa untuk mengurangi fluktuasi *income* sebelum pos-pos luar biasa. Dua macam *smoothing* yang terjadi yang ditemukan yaitu: a) *smoothing* klasifikasi mengacu pada *smoothing* angka *income* melalui reklasifikasi pos-pos tertentu dan b) *smoothing* bukan klasifikasi mengacu pada *smoothing* atas *income* bersih (semua pendapatan dan beban bersih) melalui manipulasi kejadian yang terjadi, pengakuan akuntansi, dan alokasi waktu.

Sedangkan penelitian Trueman dan Titman (1988) menunjukkan bahwa alternatif yang lebih disukai manajer dengan cara menghasilkan aliran *income* yang lebih *smooth*. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa memang banyak alasan yang dapat memotivasi manajer untuk *income smoothing* sehingga berdampak pada kenaikan harga saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer perusahaan dalam melakukan *income smoothing* bertindak secara rasional dengan tujuan untuk mengurangi klaim dari pemegang saham atas variasi *income* ekonomis perusahaan.

Telaah Penelitian Terdahulu

Dalam hubungan keagenan, manajer memiliki asimetri informasi dan dapat menggunakan informasi yang diketahuinya secara lebih fleksibel dalam usaha memaksimalkan kepentingannya. Karena fleksibilitas ini, manajemen dapat secara sistematis mempengaruhi pelaporan *income* dari tahun ke tahun untuk

meratakan variabilitas *income*. Manajer yang menolak risiko, yaitu manajer yang menghindari pinjaman dan pemberian pinjaman di pasar modal, terdorong untuk melakukan *income smoothing* (Lambert, 1984 dan Dye, 1988). Demikian juga dalam hubungannya dengan kreditor, manajer lebih menyukai alternatif yang menghasilkan *income smoothing* (Trueman dan Titman, 1988). Hasil penelitian Suh (1990) juga menunjukkan adanya motivasi kuat yang mendorong manajer melakukan *income smoothing*.

Telaah beberapa penelitian atas instrumen laporan dalam perilaku *income smoothing*, seperti metode depresiasi (Archibald, 1967), perubahan akuntansi (Cushing, 1969), *extraordinary items* (Dascher dan Malcom, 1970, Ronen dan Sadan, 1975, serta Beattie, *et al.*, 1994). Di lain pihak, penelitian Dopuch dan Drake (1966) dalam Zuhroh (1996) menjelaskan bahwa *capital gain/losses* dari penjualan investasi tidak signifikan kontribusinya dalam *income smoothing*. Lebih lanjut, Copeland dan Licastro (1968) dan White (1970) tidak menemukan bukti empiris bahwa penggunaan informasi *income smoothing* dalam keputusan akuntansi *discretionary* dan cabang yang tidak dikonsolidasi.

Selain instrumen *income smoothing*, beberapa penelitian terdahulu juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *income smoothing*. Smith (1976) menjelaskan bahwa manajer perusahaan sangat cenderung melakukan *income smoothing*. Kesimpulan ini didukung oleh temuan Trueman, *et al.* (1988) bahwa manajer secara rasional ingin *income smoothing* dengan alasan memperkecil tuntutan pemilik perusahaan.

Manajer dapat memanfaatkan beberapa faktor yang dianggap secara signifikan mempengaruhi perilaku *income smoothing*. Penelitian Moses (1987) mengungkapkan bahwa besarnya perusahaan (diukur dengan total aktiva) berpengaruh signifikan terhadap perilaku *income smoothing*; akan tetapi Ilmainir (1993), Ashari, *et al.* (1994), Zuhroh (1996), serta Jin dan Machfoedz (1998)—yang menggunakan total aktiva sebagai ukuran variabel besarnya perusahaan—menyimpulkan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku *income smoothing*. Selanjutnya, sebagian besar temuan penelitian terdahulu, seperti Archibald (1967), White (1970), Ashari, *et al.* (1994), serta Carlson dan Chenchuramaiah (1997) menyimpulkan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap perilaku *income smoothing*, meskipun penelitian Zuhroh (1996) serta Jin dan Machfoedz (1998) menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perilaku *income smoothing*. Faktor kelompok usaha juga disimpulkan berpengaruh terhadap perilaku *income smoothing* (Belkaoui dan Picur, 1984; Albrecht dan Richardson, 1990; serta Ashari *et al.*, 1994), tetapi tidak demikian halnya dengan hasil temuan Jin dan Machfoedz (1998) yang menyimpulkan bahwa sektor industri bukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku *income smoothing*. Faktor berikutnya yang disimpulkan berpengaruh terhadap perilaku *income smoothing* adalah faktor kebangsaan (Ashari, *et al.*, 1994). Beberapa faktor lain yang diduga memicu perilaku *income smoothing* yang juga diteliti oleh Ilmainir (1993) adalah rencana bonus (tidak

signifikan), harga saham (signifikan), perbedaan antara *income* aktual dan *income* normal (signifikan), dan kebijakan akuntansi terhadap *income* (signifikan), sedangkan satu-satunya faktor yang disimpulkan berpengaruh signifikan terhadap perilaku *income smoothing* oleh Zuhroh (1996) serta Jin dan Machfoedz (1998) adalah *leverage* operasi.

Penelitian Belkaoui dan Picur (1984) menunjukkan bahwa perusahaan yang bergerak pada sektor industri *peripheral* memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dalam melakukan *income smoothing* dibandingkan perusahaan yang bergerak pada sektor industri inti.

Dalam penelitian Moses (1987) membagi variabel *income smoothing* yaitu: 1) konsekuensi ekonomi yang diproksikan dengan ukuran perusahaan, pangsa pasar, kompensasi bonus, dan pengendalian kepemilikan serta 2) *income* yang diproksikan dengan variabilitas dan ketidakpastian *income*. Tujuan penelitian Moses (1987) adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *income smoothing*. Sampel data terdiri atas 212 kejadian perubahan akuntansi *discretionary*. Alat uji dengan pengujian *univariate (t-test)* dan *multivariate (least square regression)*. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor *income smoothing* yaitu ukuran perusahaan, perbedaan antara *income* sesungguhnya dengan yang diharapkan, dan ada tidaknya rencana kompensasi bonus. Penelitian Moses (1987) mendukung penelitian Healy (1985).

Albrecht dan Richardson (1990) menyatakan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam studi yang berkaitan dengan *income smoothing*. Ketiga pendekatan tersebut adalah: a. pendekatan klasik: hubungan antara pemilihan variabel *income smoothing* dan pengaruhnya pada *income* yang dilaporkan; b. pendekatan variabilitas *income*: membedakan perilaku *income smoothing* buatan dan sesungguhnya (tekanan pada variabilitas obyek *income smoothing*); c. pendekatan *dual economy*: membagi sistem bisnis menjadi dua, yaitu *core* dan *periphery*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Albrecht dan Richardson (1990) tidak berhasil membuktikan adanya perbedaan antara perusahaan sektor *core* dan *periphery* di dalam kaitannya dengan *income smoothing*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan variabilitas *income*. Sampel data yang diuji meliputi 512 perusahaan yang dapat dibedakan atas perusahaan sektor *core* dan *periphery* dengan menggunakan analisa logit.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ashari *et al.* (1994), ditemukan ada praktik *income smoothing* pada perusahaan yang terdaftar di *Singapore Stock Exchange*. Ashari *et al.* (1994) melihat empat faktor sebagai faktor yang mempengaruhi praktik *income smoothing*. Adapun faktor-faktor tersebut adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis industri, dan kepemilikan. Pengujian dengan cara *univariate (t-test dan chi-square)* serta *multivariate* (analisa logit). Sampel praktik *income smoothing* terdiri atas 153 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Singapura. Hasil penelitian menunjukkan yang signifikan adalah variabel profitabilitas, jenis industri, dan kepemilikan sedangkan variabel yang tidak signifikan adalah ukuran perusahaan. Dengan kata lain yang berpengaruh

terhadap *income smoothing* adalah variabel profitabilitas, jenis industri, dan kepemilikan, sedangkan variabel yang tidak berpengaruh terhadap *income smoothing* adalah ukuran perusahaan.

Penelitian Beattie *et al.* (1994) dengan menggunakan sampel *income smoothing* di Inggris. Variabel *income smoothing* yang digunakan adalah *income* setelah pajak tetapi sebelum pos luar biasa. Analisa dengan regresi OLS. Hasil penelitiannya bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara variabilitas *income*, pembayaran dividen, opsi saham, dan *diffuseness* kepemilikan saham artinya ada pengaruh antara variabilitas *income*, pembayaran dividen, opsi saham, dan *diffuseness* kepemilikan saham dengan praktik *income smoothing*.

Penelitian yang melihat adanya praktik *income smoothing* dengan menggunakan rasio keuangan dilakukan oleh Lee dan Wu (1994) dalam Zuhroh (1996). Rasio keuangan yang dipergunakan terdiri dari enam rasio seperti penelitian Lev (1979) dan Frecka dan Lee (1983) dalam Beattie (1994) ditambah dengan *return on total assets* dan *profit margin on sales*. Jumlah perusahaan yang dipergunakan sebagai sampel sebanyak 137 perusahaan dalam 11 kategori industri. Periode penelitian selama 20 tahun mulai dari 1971 sampai dengan tahun 1990.

Michelson *et al.* (1995) melakukan penelitian di Amerika yang bertujuan untuk menguji hubungan antara *income smoothing* dengan kinerja di pasar. Pengujian meliputi kecenderungan perusahaan utama untuk melakukan *income smoothing*, perbedaan dalam rata-rata *return* dari saham di antara perusahaan *income smoothing* dan tidak, serta risiko pasar yang diperkirakan dengan *income smoothing*. Pengujian dengan sampel sejumlah 358 perusahaan. Variabel yang digunakan dalam model *income smoothing* ada empat yaitu: *income* operasi setelah penyusutan, *income* sebelum pajak, *income* sebelum pos-pos luar biasa, dan *income* bersih. Hasil penelitiannya adalah perusahaan yang *income smoothing* memiliki rata-rata tingkat pengembalian tahunan yang lebih rendah secara signifikan dibandingkan dengan yang tidak melakukan *income smoothing* artinya perusahaan yang tidak melakukan *income smoothing* memiliki beta yang lebih rendah dan nilai pasar ekuitas yang lebih tinggi.

Carlson dan Chenchuramaiah (1997) menggunakan variabel perbedaan kepemilikan, struktur insentif eksekutif, dan kemampuan menghasilkan *income* (ukuran perusahaan) untuk menjelaskan perilaku *income smoothing*. Hasil penelitian yang signifikan variabel proporsi kepemilikan dan ukuran perusahaan. Penelitian ini mendukung Albrecht dan Richardson (1990) berkaitan dengan ukuran perusahaan.

Penelitian mengenai praktik *income smoothing* di Indonesia dilakukan oleh Ilmainir (1993) dan Zuhroh (1996). Ilmainir (1993) menguji faktor-faktor *income* dan faktor-faktor konsekuensi ekonomi yang mempengaruhi praktik *income smoothing* pada perusahaan publik di Indonesia. Metodologi yang digunakan mengacu Moses (1987). Faktor-faktor *income* yang diuji adalah perbedaan antara *income* aktual dengan *income* normal serta pengaruh perubahan kebijakan

akuntansi terhadap *income*. Sedangkan faktor-faktor konsekuensi ekonomi yang diuji adalah ukuran perusahaan, keberadaan perencanaan bonus, dan harga saham. Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 perusahaan publik yang melakukan perubahan kebijakan akuntansi. Periode pengamatan antara tahun 1987-1992. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua faktor *income* mendorong terjadinya praktik *income smoothing* sedangkan dari tiga faktor konsekuensi ekonomi yang diuji, hanya faktor harga saham saja yang mendorong adanya praktik *income smoothing*.

Penelitian Zuhroh (1996) mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ashari *et al.* (1994) yaitu meneliti faktor-faktor yang dapat dikaitkan dengan terjadinya praktik *income smoothing*. Sampel penelitian adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sebanyak 54 perusahaan. Periode antara tahun 1990-1994. Variabel independen yang diuji, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, dan *leverage* operasi perusahaan. Pengujian dengan *univariate* (Mann-Whitney dan *t-test*) serta *multivariate* (analisa logit). Sedangkan untuk menentukan apakah perusahaan melakukan *income smoothing* atau tidak, digunakan indeks Eckel (1981). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya *leverage* operasi yang signifikan terhadap praktik *income smoothing*.

Hasil penelitian yang dilakukan di Indonesia, Singapura, dan Amerika ada perbedaan mengenai ukuran perusahaan terhadap *income smoothing*.

Variabel ukuran perusahaan tidak signifikan untuk perusahaan di Indonesia dan Singapura sedangkan di Amerika signifikan. Ilmainir (1993) berpendapat bahwa kenyataan ini disebabkan adanya perbedaan perlakuan pemerintah yang berbeda antara negara maju dan negara yang sedang berkembang. Di negara maju pemerintah cenderung membebaskan biaya politikal terhadap perusahaan sehingga semakin besar perusahaan akan semakin besar pula biaya politikal yang dibebankan kepada perusahaan tersebut. Sedangkan di negara yang sedang berkembang, pemerintah lebih cenderung untuk mendorong perkembangan perusahaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi sehingga ukuran perusahaan tidak menjadi patokan pemerintah untuk membebaskan biaya politikal.

Ilmainir (1993) juga mengemukakan bahwa karena praktek *income smoothing* erat kaitannya dengan konflik kepentingan antara manajemen dengan pihak lain yang berkepentingan dalam perusahaan, maka perusahaan kecil umumnya cenderung dikelola langsung oleh pemilik mempunyai tingkat kerumitan yang lebih rendah dibanding perusahaan besar. Oleh karena itu penelitian tentang praktek *income smoothing* hanya relevan untuk perusahaan besar. Kategori perusahaan besar menurut Ilmainir (1993) adalah perusahaan yang menjual sahamnya di bursa dan perusahaan kecil adalah yang tidak menjual sahamnya di bursa.

Konsekuensi Ekonomi Dari Regulasi *goodwill*: Pengalaman Australia

Studi tentang konsekuensi ekonomi dari regulasi akuntansi *goodwill* di Australia dalam Nurkholis (2000) dimotivasi oleh adanya debat berkepanjangan tentang akuntansi *goodwill* serta kritik-kritik tajam yang diarahkan pada Standar Akuntansi *Goodwill* (AASB 1013). Akuntansi *goodwill* menjadi bahan debat yang berkepanjangan dan nampaknya tidak akan ada jawaban tunggal yang benar atas permasalahan akuntansi *goodwill* ini (Johnson, 1993, dan Grant, 1996). Penelitian secara empiris atas praktik akuntansi *goodwill* di Australia terhadap standar akuntansi *Australian Accounting Standard 18* (AAS 18) dilakukan oleh Camegie dan Gibson (1987), Kirkness (1987), Williams dan Camegie (1989), Wines dan Ferguson (1993), serta Dunstan (1991).

Camegie dan Gibson (1987) dan Kirkness (1987) melaporkan bahwa selama periode 1980-1985 sebagian besar perusahaan di Australia menganut kebijakan penghapusan (*write-off*) terhadap *goodwill*. Penelitian William dan Camegie (1989) dalam *Accounting Standard Review Board 18* (ASRB 18) telah secara signifikan menguraikan keragaman praktik akuntansi *goodwill* di Australia. Wines dan Ferguson (1993) mendukung penelitian William dan Camegie (1989). Dunstan (1991) juga mendukung penelitian William dan Camegie (1989) dan berkesimpulan bahwa regulasi akuntansi *goodwill* di Australia telah efektif dalam mendorong keseragaman (*uniformity*) praktik akuntansi.

Meskipun sudah ada bukti-bukti empiris bahwa setelah dikeluarkannya *Australian Accounting Standard Board 1013* (AASB 1013) yang dapat mengikat secara hukum (*legally binding*) terhadap praktik akuntansi *goodwill*, ternyata masih muncul kontroversi dan debat mengenai akuntansi *goodwill* di negara Australia. Kritisi atas *Australian Securities Commission* (ASC) agar perusahaan-perusahaan yang telah melakukan akuisisi mentaati AASB 1013 dilakukan oleh Miller (1995) dan Ries (1994). Miller (1995) mengkritik bahwa keputusan ASC ini merupakan “bom waktu” karena tidak adanya interpretasi yang jelas tentang standar AASB 1013. Ries (1994) juga mengkritik bahwa komunitas bisnis Australia juga menentangnya karena standar akuntansi tersebut dianggap akan menempatkan perusahaan-perusahaan Australia pada posisi yang tidak menguntungkan (*a distinct disadvantage*).

Adanya konsekuensi ekonomi serta ketidaktaatan perusahaan terhadap standar akuntansi yang ada merupakan alasan utama munculnya kontroversi akuntansi *goodwill* di Australia. Hal ini disebabkan metode akuntansi yang diterapkan untuk mencatat/tidak mencatat *goodwill* akan berpengaruh pada angka *income* akuntansi. Adanya motivasi ekonomik tertentu seperti adanya skema bonus, keinginan menunjukkan kinerja keuangan yang lebih bagus, pengaruh yang diantisipasi terhadap harga saham, dan alasan-alasan ekonomik lainnya. Alasan tersebut yang mendasari *attitude* manajer mengenai kesetujuan/ketidaksetujuan terhadap AASB 1013 (Dunstan, 1991).

Akuntansi Untuk *Goodwill*

Goodwill didefinisikan AAS sebagai “*future economic benefits from unidentifiable assets*” (paragraf 2d). Dalam standar ini *identifiable assets* didefinisi sebagai “*those assets which are capable of being both identified and specifically recorded in the books of accounts*” (paragraf 2e) dalam Nurkholis, 2000).

Goodwill dapat disebut sebagai aset atau tidak menjadi suatu bahan debat, misalnya: Hendriksen dan Van Breda (1992) berpendapat bahwa *goodwill* tidak memenuhi karakteristik sebagai aset seperti *identifiability* dan *separability*. Demikian pula Cotlett dan Olson, sebagaimana dikutip oleh Henderson dan Peirson (1995:15) menyatakan bahwa “*goodwill is not an assets and, therefore, should be written-off immediately against shareholder’s fund as it cannot be sold separately.*”

Terlepas dari adanya *conceptual debate* semacam itu, saat ini *goodwill* telah lazim diakui sebagai aset karena ia memenuhi karakteristik aset sebagaimana dinyatakan dalam SAC No. 4 (Australia) maupun SFAC No. 6 (USA). Berdasarkan kriteria yang dinyatakan dalam SAC No. 4 dan SFAC No. 6 ini, *goodwill* yang boleh diakui hanya *purchased goodwill* (yang dihasilkan dari kombinasi perusahaan atau akuisisi). Sedangkan *internally generated goodwill* tidak boleh diakui.

Regulasi Akuntansi *Goodwill* di Australia dan Kontroversi yang Terjadi

Regulasi akuntansi *goodwill* di Australia yang pertama kali dilakukan pada saat dikeluarkannya AAS 18 bulan Maret 1984 atas laporan keuangan yang berakhir 31 Maret 1985. Kirkness (1987) melaporkan periode 1980-1985 ada berbagai macam perlakuan akuntansi terhadap *goodwill*, yakni: (1) kapitalisasi tanpa amortisasi; (2) kapitalisasi dan amortisasi yang tidak sistematis; (3) kapitalisasi dan amortisasi sistematis; (4) *goodwill* dikurangkan secara sistematis terhadap *shareholder’s fund*; (5) *goodwill* yang timbul dihapuskan seketika dan diakui sebagai *extraordinary item* dalam perhitungan laba-rugi. Kirkness (1987) selanjutnya menemukan bahwa kapitalisasi dan amortisasi sistematis sebagaimana diminta oleh standar tersebut justru yang paling tidak populer. Ini mengindikasikan adanya ketidaktaatan pada standar tersebut (Nurkholis, 2000).

Reaksi lainnya yang ditunjukkan oleh perusahaan di Australia adalah mengakui aktiva tak berwujud lainnya dan mengurangi jumlah yang seharusnya diakui sebagai *goodwill* sebagai upaya untuk menghindari amortisasi. *The Australian Accounting Research Foundation* (AARF) kemudian merespon praktik semacam ini dengan cara mengeluarkan *Exposure Draft No. 49, “Accounting for Identifiable Intangible Assets,”* pada Agustus 1989. Banyak komentar yang menentang dengan keluarnya *Australian Accounting Standard Board* (AASB) dan *Public Sector Accounting Standard Board* (PSASB) atas *Exposure Draft No. 49* tersebut (Henderson dan Peirson, 1995).

Konsekuensi ekonomi dalam proses penyusunan standar memainkan peranan penting. Sebagaimana dilaporkan oleh Tutici *et al.* (1989), responden *Exposure Draft No. 49* telah berusaha melobi badan penyusun standar dengan alasan

konseptual dan konsekuensi ekonomi yang diakibatkan oleh adanya standar tersebut. Perusahaan seperti *Pacific Dunlop*, misalnya, menggunakan berbagai argumen untuk menjustifikasi penerapan *inverted sum of the year's digit (ISOYD) method* untuk mengamortisasi *goodwill* yang telah dikapitalisasi.

Upaya untuk menyelesaikan kontroversi tersebut, AASB dan PSASB mengeluarkan amandemen terhadap AAS 18/AASB 1013 yang menyatakan bahwa *goodwill* yang timbul dari akuisisi harus dikapitalisasi dan hanya boleh diamortisasi selama maksimal 20 tahun dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line basis*) dan mulai diterapkan untuk laporan keuangan yang berakhir 30 Juni 1996 (*Australian Accountant*, June, 1996). Ini dilakukan untuk mengakhiri kontroversi tersebut sekaligus melarang penggunaan metode ISOYD atau metode bunga (*discount* atau *annuity*) dan metode-metode lainnya yang dianggap tidak lazim diterapkan meskipun memenuhi kriteria "sistematik."

Konsekuensi Ekonomi dan Regulasi Akuntansi *Goodwill*

Studi tentang konsekuensi ekonomi atas regulasi akuntansi mendasarkan *theory of the firm* (Jensen dan Meckling, 1976), yang menyatakan bahwa pada hakikatnya suatu perusahaan merupakan pusat kontrak (*nexus of contract*) di antara pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan eksistensi/operasi perusahaan (misalnya antara pemilik/*principal* dengan manajer/*agent*). Masing-masing pihak, dalam hubungan kontraktual tersebut, dianggap sebagai individu yang rasional dan karenanya akan berupaya meningkatkan kesejahteraannya masing-masing. Kontrak-kontrak yang dimaksudkan tidak selalu harus dianggap sebagai suatu kontrak yang "formal" atau eksplisit, tetapi dapat pula bersifat implisit (Watts dan Zimmerman, 1989). Kontrak yang terkait dalam pemberian bonus seringkali didasarkan pada *income* akuntansi (Watts dan Zimmerman, 1986).

Watts dan Zimmerman (1986) mendukung *contractual theory of the firm* atas alasan-alasan pemilihan metode akuntansi dan reaksi perusahaan terhadap regulasi akuntansi. Selanjutnya Holthausen dan Leftwich (1983) menyatakan bahwa konsekuensi ekonomi atas regulasi akuntansi dapat dilihat dari pengaruh penggunaan metode akuntansi terhadap *cash flow* perusahaan atau kesejahteraan dari pihak-pihak yang akan menggunakan angka-angka akuntansi untuk pembuatan kontrak atau pengambilan keputusan.

Reaksi yang beragam terhadap regulasi akuntansi *goodwill* di Australia tersebut merupakan salah satu contoh konsekuensi ekonominya Dunstan (1991: 26). Bentuk lain konsekuensi ekonomi dari regulasi akuntansi *goodwill* adalah munculnya argumen *competitive disadvantage* yang dikemukakan oleh beberapa perusahaan dan lobi yang dilakukan oleh beberapa kelompok perusahaan untuk *me-review* standar akuntansi tersebut (Ries, 1994 dan Miller, 1995).

PENUTUP

Penyusun standar akuntansi diarahkan kepada *decion usefulness* dan pengurangan asimetri informasi. Bagaimanapun, kriteria itu tidak menjamin suatu standar akan sukses. Kepentingan manajemen dan konstitusi yang lain perlu dipertimbangkan sebagai perhatian yang sangat besar selama proses berjalan. Karenanya problem mendasar teori akuntansi keuangan terlihat bahwa proses penyusunan standar yang sebenarnya lebih baik dijelaskan dengan *teori interest group* dan *regulation* daripada dengan teori *public interest* disamping teori-teori yang lain seperti *PAT*, *agency theory*, dan *signaling theory*.

Proses politik dalam pembentukan suatu standar berakibat pada konsekuensi ekonomi yang mempunyai dampak yang sama besar atau dengan kata lain jika intervensi politik besar maka konsekuensi ekonomi besar sehingga mengakibatkan banyak pihak yang dilukai tetapi jika netral maka pihak yang dilukai juga sedikit (misalnya: cara yang dilakukan adalah *public hearing* sebelum suatu standar ditetapkan)

REFERENSI

- Albrecht, W.D., and Richardson, F.M., (1990), "Income Smoothing by Economy Sector," *Journal of Business Finance & Accounting*, Winter, h. 713-730.
- Archibald, T.R., (1967), "The Return to Straight-Line Depreciation: An Analysis of a Chang in Accounting Method," *Journal of Accounting Research*, Supplement, h. 164-180.
- Ashari, N., Koh, H. C., Tan, S. L., and Wong, W. H., (1994), "Factors Affecting Income Smoothing among Listed Companies in Singapore," *Accounting and Business Research*, Autumn, h. 291-301.
- Australian Society of Certified Practicing Accountants (ASCPA) and the Institute of Chartered Accountants in Australia (ICAA), (1996), *Accounting Handbook*, Prentice Hall of Australia, Sydney.
- Beattie, V., Brown, S., Ewers, D., John, B., Manson, S., Thomas, D., and Turner, M., (1994), "Extraordinary Items and Income Smoothing: A Positive Accounting Approach," *Journal of Business Finance & Accounting*, September, h. 791-811.
- Beaver, William, H., dan Dukes, Roland, E., (1972), "Inter-period Tax Allocation, Earnings Expectation, and The Behavior of Security Prices," *Accounting Review*, April, h.321.

- Beidleman, C. R., (1973), "Income Smoothing: The Role of Management," *Accounting Review*, October, h. 653-667.
- Belkaoui, A., and Picur, R. D., (1984), "The Smoothing of Income Number : Some Empirical Evidence on Systematic Differences between Core and Periphery Industrial Section," *Journal of Business Finance & Accounting*, Winter, h. 527-545.
- Boland, L.A. dan I. M., Gordon (1992), "Criticizing Positive Accounting Theory," *Contemporary Accounting Research, Fall*, h.147-170.
- Camegie, G. D., dan Gibson, R. W., (1987), "Accounting for Goodwill on Consolidation Before and After AAS 18," *Accounting and Finance*, November, h. 1-12.
- _____, (1991), "The Evolution of Accounting Standards for Goodwill in the English-Language Countries Following APB Opinion No. 70 (1970)," *Advanced in International Accounting*, Vol. 4, h. 3-17.
- Carlson, Steven J. dan Chenchuramaiah, T. Bathala, (1997), Ownership Differences and Firms' Income Smoothing Behavior," *Journal of Business, Finance, and Accounting*, Maret, h. 179-196.
- Christie, A.A. dan J. Zimmerman, (1994), "Efficient and Opportunistic Choices of Accounting Procedures: Corporate Control Contest," *The Accounting Review*, October, h. 539-566.
- Clinch, G., (1995), "Capital Market Research and Goodwill Debate," *Australian Accounting Review*, June, h. 22-30.
- Copeland, R. M., and Licastro, R. D., (1968), "A Note on Income Smoothing," *Accounting Review*, July, h. 540-545.
- Demski, J., (1988), "Positive Accounting Theory: A Review," *Accounting, Organization, and Society*, October, h. 623-629.
- Dechow, P.M., (1994), "Accounting Earnings and Cash Flows as Measures of Firm Performance: The Role of Accounting Accruals," *Journal of Accounting and Economics*, July, h. 3-42.

- Dunstan, K. L., (1991), *Corporate Reaction to the Regulation of Accounting for Goodwill*, The Committee for Economic Development of Australia (CEDA), Australia.
- Eckel, N., (1981), "The Income Smoothing Hypothesis Revisited," *Abacus*, June, h. 28-40.
- FASB, (1978), *Statement of Financial Accounting Standard No. 19, 25, 69*.
- Foster, George, (1986), *Financial Statement Analysis*, Second Edition, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
- Frith, B., (1993), "ASC Plan for Goodwill Commentary," *The Australian*, 29 September, h. 37/38.
- Gerboth, Dale, L., (1973), "Research, Intuition, and Politic In Accounting Inquiry," *Accounting Review*, July, h. 481.
- Gonedes, Nicholas, J., dan Dopuch, Nicholas, (1974), "Capital Market Equilibrium, Information Production, and Selecting Accounting Techniques: Theoretical Framework and Review of Empirical Work," *Studies on Financial Accounting Objectives*, Supplement to Vol. 12 of *The Journal of Accounting Research*.
- Gordon, M. J., (1964), "Postulates, Principles and Research in Accounting," *Accounting Review*, April, h. 251-263.
- Grant, S., (1996), "Goodwill: Debate that Never Ends," *Australian Accountant*, December, h. 18-21.
- Harring, J. R., Jr., (1979), "Accounting Rules and the 'Accounting Establishment'," *Journal of Business* 52, No. 4., h. 507-19.
- Hawkins, David, M., (1975), "Financial Accounting, the Standards Board and Economic Development," Bernard M. Baruch College, City University of New York, April, h. 7-8.
- Healy, P.M., (1985), "The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions," *Journal of Accounting and Economics*, April, h. 85-107.
- Hector, G., (1989), "Cute Tricks on the Bottom Line," *Fortune*, April 24, h. 195, 196 and 200.

- Henderson, S., dan Peirson, G., (1995), *Issues in Financial Accounting*, 7th edition, Longman Australia Ltd., Melbourne.
- Hendriksen, E. S., dan Van Breda, M. F., (1992), *Accounting Theory*, 5th edition, Richard D. Irwin, Inc., Boston.
- Hepworth, S. R., (1953), "Smoothing Periodic Income," *Accounting Review*, January, h. 32-39.
- Holthausen, R. W., dan Leftwich, R. W., (1993), "The Economic Consequences of Accounting Choice: Implications for Costly Contracting and Monitoring," *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 5, h. 77-177.
- Horngren, Charles, T., (1973), "The Marketing of Accounting Standards," *JOFA*, Oktober, h. 61.
- Hussein, M. E., dan J.E. Ketz, (1980), "Rulling Elites of the FASB: A study of The Big Eight," *Journal of Accounting, Auditing, and Finance*, Summer.
- Ilmainir, (1993), "Perataan Laba dan Faktor-Faktor Pendorongnya pada Perusahaan Publik di Indonesia," *Tesis S2*, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Jensen, M. C., dan Meckling, W. H., (1976), "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure," *Journal of Financial Economics*, h. 305-360.
- Jin, Liauw She dan Machfoedz, Mas'ud, (1998), "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta," *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 1, No. 2, Juli, h. 174-191.
- Johnson, J. D., (1993), "Goodwill: An Eternal Controversy," *The CPA Journal*, April, h. 58-64.
- Jones, J., (1991), "Earnings Management During Import Relief Investigation," *Journal of Accounting Research*, Autumn, h. 193-149.
- Khalik, Abdel, (1978), "Understanding Accounting Changes in an Efficient Market: Evidence of Differential Reaction," *The Accounting Review*, October, h. 851-868.

- Kamin, J. Y., dan Ronen, J., (1978), "Smoothing of Income Numbers: Some Empirical Evidence of Systematic Differences among Management-controlled and Owner-controlled Firms," *Accounting Organization and Society*, September, h. 141-157.
- Kirkness, J. J., (1987), "The Impact of AAS 18," *The Chartered Accountant in Australia*, December, h. 49-51.
- Koch, Bruce, S., (1981), "Income Smoothing: An Experiment," *Accounting Review*, July, h. 574-586.
- Lambert, R., (1984), "Income Smoothing as Rational Equilibrium Behavior," *Accounting Review*, October, h: 604-618.
- Lev, B. dan S. Kunitzky, (1974), "On the Association Between Smoothing Measures and the Risk of Common Stock," *Accounting Review*, April, h. 259-270.
- Lev, Baruch, (1979), "The Impact of Accounting Regulation on the Stock Market: The Case of Oil and Gas Companies," *The Accounting Review*, Vol, LIV No. 3, July, h. 485-503.
- May, Robert, G., dan Sundem, Gary, L., (1976), "Research for Accounting Policy: An Overview," *Accounting Review*, Oktober, h.750.
- McHugh, G., (1992), "The Unbearable Lightness of Accounting," *Certified Accountant*, September, h. 20-21.
- Mian, S.L. dan C.W., Smith, Jr (1990), "Incentives for Unconsolidated Financial Reporting," *Journal of Accounting and Economics*, January, h.141-171.
- Michelson, S. E., Wagner, J. J., dan Wootton, C. W., (1995), "A Market Based Analysis of Income Smoothing," *Journal of Business Finance & Accounting*, December, h. 1179-1193.
- Miller, M. C., (1995), "Goodwill Discontent: The Meshing of Australian and International Accounting Policy," *Australian Accounting Review*, June, h. 3-16.
- Miller, Paul, B.,W., dan Redding, Rodney, J., (1988), *The FASB: The People, The Process, and The Politics*, Second Edition, Homewood, Illinois.

- Moses, O. D., (1987), "Income Smoothing and Incentives: Empirical Test Using Accounting Changes," *Accounting Review*, April, h. 358-377.
- Newman, D. P., (1981a), "An Investigation of the Distribution of Power in the APB and FASB," *Journal of Accounting Research*, Spring, h. 247-62.
- _____, (1981b), "The SEC's Influence on Accounting Standards: The 'Power' of the Veto," *Studies on Standardization of Accounting Practices*, Supplement to *Journal of Accounting Research* 19, h. 134-56.
- Nurkholis, (2000), "Konsekuensi ekonomi dari Regulasi Akuntansi Goodwill," *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 3, No. 2, juli, h. 185-202
- Pacific Dunlop, (1994), "When Goodwill Creates Ill-Will: The Case for Review Accounting Standard 1013," *Pacific Dunlop Issues Paper*, August.
- Ries, I., (1994), "ASC's Bad Standard on Goodwill," *Financial Review*, 23 August.
- Ronen, Joshua dan Sadan, Simeha, (1975), "Classificatory Smoothing: Alternative Income Models," *Journal of Accounting Research*, Spring, h. 133-149.
- Scott, William, R, (1997), *Financial Accounting Theory*, Prentice-all International, New Jersey.
- Selto, Frank, H. Dan Grove, Hugh, D., (1982), "Voting Power Indices and the Setting of Financial Accounting Standards: Extensions," *Journal of Accounting Research*, Vol. 20, No. 2, Autumn.
- Smith, E. D., (1976), "Effects of Separation of Ownership from Control on Accounting Policy Decisions," *Accounting Review*, October, h. 707-723.
- Solomons, David, (1978), "The Politicization of Accounting," *The Journal of Accountancy*, November, h. 65-72.
- Suh, Y.S., (1990), "Communication and Income Smoothing Through Accounting Method Choice," *Management Science*, June, h. 704-723.
- Sweeney, A. P., (1994), "Debt-covenant Violations and Managers' Accounting Responses," *Journal of Accounting and Economics*, May, h. 281-308.

- Trueman, B., dan Titman, S., (1988), "An Explanation for Accounting Income Smoothing," *Journal of Accounting Research*, Supplement, h. 127-143.
- Tuttici, I., Dunstan, K., dan Holmes, S., (1989), "Respondent Lobbying in the Australian Accounting Standard Setting Process: ED49-A Case Study," *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 7, No. 2, h. 86-104.
- Watts, R. L., dan Zimmerman, J. L., (1986), *Positive Accounting Theory*, Prentice Hall, New Jersey.
- _____, (1989), "Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective," *Accounting Review*, Vol. 65, No. 1, h. 131-156.
- White, Gary E., (1970), "Discretionary Accounting Decision and Income Normalization," *Journal of Accounting Research*, Autumn, h. 260-274.
- Whittred, G., Zimmer, I., dan Taylor, S., (1996), *Financial Accounting: Incentive Effects and Economic Consequences*, 4th edition, Harcourt Brace, Sydney.
- Williams, S., dan Camegie, G., (1989), "The Continuing Impact of AAS 18," *Australian Accountants*, May, h. 89-91.
- Wines, G. L., dan Ferguson, C. B., "An Empirical Investigation of Accounting Methods for Goodwill and Identifiable Intangible Assets: 1985-1990," *Abacus*, Vol. 29, No. 1, h. 90-105.
- Wolk, H.J, Francis dan M. Tearney, (1996), *Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach*, Fourth Edition, South Western, International Thomson Publishing.
- Zeff, Stephen, A., (1978), "The Rise of 'Economic Consequences'," *The Journal of Accountancy*, December.
- Zuhroh, D., (1996), "Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Tindakan Perataan Laba pada Perusahaan Go Public di Indonesia," *Tesis S2*, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.